

LAB 45 — TELAAH KEBIJAKAN

No. 046 - 6 Maret 2026

Telaah Kebijakan LAB 45 adalah wadah yang dirancang untuk menyampaikan pandangan kritis dan analisis terkini dari para peneliti serta analisis kebijakan terkait berbagai isu strategis seputar politik keamanan, ekonomi politik, politik media, dan gender. Platform ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam sekaligus menawarkan gagasan inovatif dalam menghadapi tantangan lokal ataupun global. Pendapat yang tercantum dalam setiap komentar merupakan tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak merefleksikan posisi resmi LAB 45. Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi tim kami melalui lab45@lab45.id.



Tepi Jurang Geopolitik:

Ketika Krisis Global Menemukan Indonesia yang Belum Siap

Tepi jurang geopolitik adalah sebuah kondisi di mana sistem yang selama ini stabil mendekati titik di mana perubahan kecil sekalipun dapat memicu transformasi besar yang tidak dapat dibalikkan. Dalam konteks tata dunia saat ini, kita sedang menyaksikan konvergensi simultan dari tiga garis patahan besar yang masing-masingnya saja sudah cukup berbahaya, tetapi bersama-sama membentuk tekanan yang bersifat eksistensial bagi tatanan internasional pasca perang dingin.

I. TEPI JURANG GEOPOLITIK: ANATOMI DUNIA YANG BERGOLAK

Garis patahan pertama adalah pertarungan kekuatan besar yang kembali berbentuk militer. Berakhirnya era tata dunia liberal yang dimulai pasca-1991 tidak hanya berarti kembalinya persaingan geopolitik sebagai mode utama hubungan internasional—ia juga berarti kembalinya ancaman konflik bersenjata antarnegara sebagai kalkulasi strategis yang nyata. Invasi Rusia ke Ukraina, eskalasi ketegangan di Selat Taiwan, dan konflik yang terus membara di Timur Tengah, termasuk Perang Iran 2026, bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Mereka adalah manifestasi dari satu tren tunggal: melemahnya norma-norma internasional yang selama tiga dekade menjadi rem bagi ambisi teritorial.

Garis patahan kedua adalah disrupti rantai pasok global yang bersifat struktural. Pandemi Covid-19 telah mengekspos kerentanan model produksi just-in-time yang selama dua dekade mendominasi ekonomi global. Perang dagang AS-Tiongkok yang kemudian mengakselerasi tren 'decoupling' telah memecah apa yang dulu disebut sebagai 'globalisasi' menjadi blok-blok ekonomi yang semakin tertutup. Sanksi ekonomi sebagai senjata geopolitik—yang digunakan secara masif terhadap Rusia—telah mengubah perhitungan risiko bagi setiap negara yang bergantung pada rantai pasok internasional.

Garis patahan ketiga adalah akselerasi perubahan iklim yang kini tidak lagi hanya menjadi isu lingkungan tetapi juga isu keamanan. Kekeringan yang memperburuk ketahanan pangan, banjir yang menghancurkan ruang hidup, dan perebutan sumber daya air yang



Andi Widjajanto
Penasihat Senior,
Laboratorium Indonesia
2045

kian sengit—semua ini menambahkan lapisan tekanan ekstra pada negara-negara yang sudah berjuang dengan tantangan pembangunan.

“Tiga garis patahan besar—tarung kekuatan besar, disruptsi rantai pasok, dan krisis iklim—bergerak bersamaan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern.”

Yang membuat momen ini secara historis unik adalah bukan kehadiran satu atau dua dari garis patahan ini—sejarah mengenal masing-masingnya secara terpisah—tetapi konvergensi simultannya. Pada 1970-an, dunia menghadapi guncangan minyak dan inflasi tinggi. Pada akhir 1990-an, krisis finansial Asia melanda. Pada 2008, sistem keuangan global nyaris runtuh. Pada setiap episodanya, ada ruang untuk manuver: satu krisis tidak secara otomatis memicu yang lain, dan solusi konvensional masih tersedia. Kali ini, keenam kanal transmisi—energi, pangan, perdagangan, investasi, arus modal, dan nilai tukar—bergerak hampir secara bersamaan, menutup salah satu pintu keluar sebelum yang lain sempat dibuka.

Bagi Indonesia, kekhususannya terletak pada posisi geografis dan struktural yang menempatkannya tepat di persimpangan semua tekanan ini. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan ketergantungan signifikan pada ekspor komoditas, impor energi olahan, dan arus modal asing, Indonesia tidak memiliki kemewahan untuk menonton krisis global dari pinggir lapangan. Ia adalah salah satu pemain utama di arena yang sedang bergolak.

II. KETIDAKSIAPAN INDONESIA: ENAM CELAH YANG TERBUKA

Jika tepi jurang geopolitik adalah realitas eksternal yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan Indonesia, maka ketidaksiapan menghadapinya adalah kondisi yang sebagian besar merupakan produk dari pilihan-pilihan kebijakan domestik selama bertahun-tahun. Ketidaksiapan ini tidak berwajah tunggal—ia hadir dalam setidaknya enam celah struktural yang kini terbuka bersamaan tepat ketika tekanan dari luar mencapai puncaknya.

Celah pertama adalah ketidaksiapan fiskal. Ruang fiskal Indonesia—kemampuan pemerintah untuk merespons krisis melalui belanja negara—telah menyempit secara signifikan. Beban bunga utang yang mengonsumsi porsi besar APBN, ditambah kebutuhan subsidi yang meningkat akibat harga energi global yang bergejolak, telah memangkas kemampuan pemerintah untuk melakukan stimulus yang efektif. Ketika krisis datang, pemerintah tidak akan mampu berbelanja keluar dari masalah dengan cara yang sama seperti yang dilakukan negara-negara maju.

Celah kedua adalah ketidaksiapan moneter. Nilai tukar Rupiah yang rentan terhadap perubahan sentimen global mencerminkan sebuah paradoks struktural: Indonesia adalah produsen komoditas besar, tetapi Rupiahnya berperilaku seperti mata uang negara yang bergantung pada arus modal jangka pendek. Cadangan devisa, meski secara nominal masih cukup, dapat tergerus dengan cepat jika terjadi pelarian modal yang masif—dan dalam kondisi volatilitas global saat ini, risiko itu bukan lagi skenario ekor kurva.

Celah ketiga adalah ketidaksiapan energi. Meski Indonesia adalah produsen batu bara dan gas alam, ia adalah importir bersih minyak olahan. Ketergantungan pada impor BBM membuat neraca berjalan Indonesia sangat sensitif terhadap harga minyak global—dan harga subsidi BBM domestik menjadi bom waktu fiskal ketika harga internasional

melonjak. Transisi energi yang lambat telah meninggalkan Indonesia dalam posisi yang tidak menguntungkan: terlalu bergantung pada bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sementara ekspor komoditas energinya tunduk pada volatilitas pasar global.

Celah keempat adalah ketidaksiapan pangan. Impor beras, gandum, kedelai, dan gula dalam jumlah besar menjadikan ketahanan pangan Indonesia sebagai fungsi dari kondisi pasar global dan ketersediaan devisa—bukan semata dari kapasitas produksi domestik. Ketika guncangan rantai pasok global menaikkan harga pangan internasional dan melemahkan Rupiah secara bersamaan, dampaknya berlipat ganda di tingkat konsumen.

“Ketidaksiapan Indonesia bukan hanya soal kelemahan kebijakan terkini—ia adalah akumulasi dari pilihan-pilihan struktural selama bertahun-tahun yang kini jatuh tempo bersamaan.”

Celah kelima adalah ketidaksiapan kelembagaan. Kapasitas negara untuk merespons krisis secara cepat, terkoordinasi, dan efektif sangat bergantung pada kualitas kelembagaan yang telah dibangun di masa normal. Di sinilah Indonesia menghadapi tantangan terberat: koordinasi antarlembaga yang lemah, birokrasi yang terfragmentasi, dan kecenderungan untuk mendahulukan kepentingan politik jangka pendek di atas kepentingan strategis jangka panjang telah mengurangi kapasitas tanggapan strategis negara secara signifikan.

Celah keenam—dan mungkin yang paling berbahaya secara politik—adalah ketidaksiapan sosial. Keresahan publik yang telah lama terakumulasi atas berbagai isu—ketimpangan ekonomi yang melebar, kemunduran ruang demokrasi, konsolidasi oligarki—membawa risiko ketika tekanan ekonomi nyata datang, ia tidak akan mendarat di atas tanah yang kosong. Ia akan mendarat di hamparan rumput kering, menunggu percikan.

III. PELAJARAN DARI TIGA KRISIS

Indonesia bukan negara yang baru pertama kali berdiri di tepi jurang. Sejarahnya adalah sejarah krisis yang berulang—dan lebih penting dari itu, sejarah pemulihan yang berulang. Tetapi setiap pemulihan meninggalkan pelajaran yang berbeda, dan tidak semua pelajaran itu telah dicerna dengan baik oleh generasi pembuat kebijakan berikutnya.

Krisis 1997–1998 adalah pelajaran paling pahit dan paling formatif. Ia dimulai sebagai krisis nilai tukar regional yang kemudian bertransformasi menjadi krisis perbankan, krisis fiskal, dan akhirnya krisis politik yang mengakhiri tiga dekade Orde Baru. Pelajaran yang paling sering dikutip adalah pentingnya menjaga fundamentals makroekonomi—defisit fiskal yang rendah, cadangan devisa yang memadai, dan sistem perbankan yang sehat. Indonesia telah mengambil pelajaran itu dengan serius: berbeda dari banyak negara berkembang, Indonesia memasuki dekade 2020-an dengan postur fiskal yang relatif konservatif.

Tetapi ada pelajaran dari 1997–1998 yang kurang sering dikutip: bahwa krisis tidak hanya diselesaikan oleh kebijakan ekonomi yang tepat, tetapi juga oleh legitimasi politik yang memungkinkan kebijakan itu dijalankan. IMF memang menyediakan bantuan finansial, tetapi paket penyelamatannya—yang disertai kondisi penghematan ketat—justru memperburuk krisis kepercayaan dan mempercepat keruntuhan politik. Pelajaran sesungguhnya dari 1997–1998 bukan hanya tentang manajemen nilai tukar, tetapi

tentang hubungan antara legitimasi pemerintahan dan kapasitas respons krisis.

Di sinilah relevansi kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri perlu dibaca ulang. Ketika Ibu Mega mengambil alih kepresidenan pada Juli 2001 di tengah guncangan pasca-Reformasi, Indonesia belum sepenuhnya keluar dari luka struktural yang ditinggalkan krisis 1997–1998. Sistem perbankan masih rapuh, utang luar negeri menghimpit, kepercayaan pasar terhadap Indonesia berada di titik nadir, dan kohesi sosial-politik terancam oleh tekanan sosial politik daerah yang keras. Ibu Mega tidak hanya mewarisi kursi kepresidenan—Ibu Mega mewarisi negara yang sedang dalam proses mendefinisikan ulang dirinya sendiri di tengah himpitan krisis yang berlapis.

Pilihan strategis Ibu Mega dalam momen itu bukan mengejar popularitas jangka pendek, tetapi membangun fondasi jangka panjang. Ibu Mega memilih konsolidasi institusional sebagai prinsip utama pemerintahannya: memperkuat sistem dan lembaga politik agar demokrasi Indonesia tidak runtuh oleh beratnya beban transisi; menstabilkan sistem hukum melalui reformasi peradilan dan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang kelak menjadi pilar demokrasi konstitusional Indonesia; merestrukturisasi sektor pertahanan dan keamanan agar TNI dan Polri dapat berjalan dalam kerangka supremasi sipil; serta menjaga disiplin makroekonomi yang memungkinkan Indonesia memenuhi kewajiban utangnya dan merebut kembali kepercayaan pasar internasional. Pelunasan utang kepada IMF lebih awal dari jadwal—yang diselesaikan pada masa kepresidenan berikutnya tetapi fondasi fiskalnya diletakkan pada era Megawat—adalah salah satu warisan paling nyata dari pilihan disiplin ekonomi yang Ibu Mega pertahankan meski secara politik tidak populer.

Dua keputusan institusional Ibu Mega yang paling berpengaruh bagi Indonesia jangka panjang adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemberlakuan sistem Pemilu Langsung 2004. KPK, yang lahir melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, adalah jawaban atas kesadaran bahwa korupsi sistemik—yang telah menggerogoti kapasitas negara jauh sebelum krisis 1997—tidak dapat diberantas hanya melalui aparat penegak hukum yang telah terinfeksi oleh patologi yang sama. Indonesia membutuhkan lembaga independen dengan kewenangan luar biasa, yang mampu menyentuh aktor-aktor yang selama ini kebal hukum. KPK bukan hanya reformasi teknis kelembagaan; KPK adalah sinyal bahwa negara pasca-Reformasi bersedia membangun arsitektur akuntabilitas yang sesungguhnya, bukan akuntabilitas yang berhenti di halaman depan birokrasi. Keberanian untuk mendirikan institusi yang secara potensial dapat mengancam kepentingan elite politik adalah salah satu tanda paling konkret dari komitmen konsolidasi demokratis era Presiden Megawati.

Pemilu Langsung 2004—di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung adalah transformasi demokratis yang tidak dapat diremehkan signifikansinya. Sebelum amendemen UUD 1945 yang menjadi dasar konstitusionalnya, Presiden dipilih oleh MPR: sebuah mekanisme yang membuka ruang luas bagi transaksi elite dan manipulasi politik yang tidak transparan. Pemilu Langsung memindahkan sumber legitimasi kepresidenan dari rantai parlemen ke suara rakyat secara langsung—sebuah pergeseran yang bersifat permanen dalam arsitektur demokrasi Indonesia. Bahwa Ibu Mega sendiri kemudian kalah dalam Pemilu Langsung pertama itu—kepada Susilo Bambang Yudhoyono—justru menjadi bukti paling ironis sekaligus paling mulia dari keputusan itu: Ibu Mega membangun sistem yang mengalahkannya sendiri, dan Ibu Mega menerima hasilnya. Itu adalah bukti bahwa konsolidasi demokrasi yang Ibu Mega pimpin bukan sekadar retorika, tetapi arsitektur yang sungguh-sungguh bekerja.

Di dimensi kebijakan luar negeri, keputusan Presiden Megawati menolak permintaan Presiden George W. Bush untuk bergabung dalam 'Coalition of the Willing' yang menyerang Irak pada 2003 adalah salah satu manifestasi paling tegas dari pelaksanaan doktrin bebas-aktif. Tekanan dari Washington nyata dan berat: AS sedang dalam puncak kampanye global pasca serangan teror 11 September, dan Indonesia—sebagai negara Muslim terbesar di dunia—memiliki nilai simbolik yang sangat besar bagi koalisi itu. Bergabung akan membuka akses ke dukungan finansial, pelonggaran kondisi pinjaman, dan penguatan hubungan bilateral yang secara jangka pendek menggiurkan. Namun Ibu Mega menolak. Penolakan itu bukan hanya keputusan taktis, melainkan keputusan strategis yang berakar pada prinsip: Indonesia tidak dapat membangun kredibilitas sebagai kekuatan menengah yang mandiri jika Ibu Mega membiarkan tekanan kekuatan besar membongkar prinsip dasarnya sendiri. Invasi Irak tanpa mandat Dewan Keamanan PBB bertentangan dengan prinsip-prinsip Dasa Sila Bandung yang menjadi DNA kebijakan luar negeri Indonesia—dan pada prinsip itu, tidak ada kompromi yang dapat ditawarkan, sebesar apapun tekanan yang datang.

Satu warisan institusional era Presiden Megawati adalah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Lahir di tengah luka ekonomi krisis 1997–1998, SJSN adalah jawaban atas kenyataan bahwa sistem Askes, Jamsostek, dan Taspen yang ada hanya menjangkau pekerja formal dan pegawai negeri—sementara sebagian besar rakyat Indonesia, terutama pekerja informal, petani, dan masyarakat miskin perkotaan, tidak memiliki perlindungan sosial apapun yang terstruktur. SJSN menetapkan kontrak sosial baru: setiap warga negara berhak atas jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian—bukan sebagai belas kasihan negara, melainkan sebagai hak konstitusional. Prinsip-prinsip yang diperkenalkannya revolusioner untuk konteks Indonesia saat itu: kepesertaan wajib, kontribusi berbasis kemampuan (yang kaya mensubsidi yang lemah), dan pengelolaan oleh badan nirlaba yang bertanggung jawab kepada negara—satu sistem nasional dengan satu semangat gotong royong.

Bahwa implementasi penuhnya baru terwujud satu dekade kemudian melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pada 2014 tidak mengurangi fakta bahwa fondasi hukum dan konseptualnya adalah warisan era Presiden Megawati. Dalam konteks analisis "Tepi Jurang", relevansinya langsung: sistem jaminan sosial yang kuat adalah shock absorber sosial yang memperlambat transmisi tekanan ekonomi eksternal menjadi ketidakstabilan politik internal. Bahwa arsitektur ini dibangun justru di tengah tekanan fiskal yang paling ekstrem adalah bukti bahwa visi jangka panjang hadir karena ada keberanian membangun struktur yang hasilnya tidak akan dinikmati oleh generasi yang membangunnya sendiri.

Seluruh bangunan kebijakan yang dijabarkan di atas tidak dapat dipahami secara utuh tanpa membacanya dalam kerangka ideologi yang menjadi fondasi kepemimpinan Megawati: Marhaenisme dan Nasionalisme Kerakyatan PDI Perjuangan. PDI-P berdiri di atas tiga pilar ideologis yang saling mengunci—Nasionalisme, Trisakti, dan Demokrasi—dengan Marhaenisme sebagai jiwa yang menghidupkannya. Marhaenisme bukan sekadar romantisme agraris; Marhaenisme adalah kerangka analisis tentang hubungan antara negara dan rakyat kecil yang percaya bahwa tugas utama negara adalah membebaskan rakyat dari kemiskinan struktural, eksploitasi, dan ketergantungan—bukan melalui revolusi kekerasan, melainkan melalui kebijakan yang berpihak secara sistematis kepada yang lemah. Dalam logika itulah SJSN bukan sekadar kebijakan sosial—SJSN adalah implementasi paling konkret dari Marhaenisme dalam bentuk undang-undang: negara hadir sebagai pelindung rakyat, bukan sebagai penonton pasar.

Demikian pula, penolakan terhadap Coalition of the Willing bukan hanya keputusan bebas-aktif yang dingin—itu adalah ekspresi dari nasionalisme kerakyatan yang tidak percaya bahwa kepentingan Indonesia dapat dititipkan kepada agenda kekuatan besar manapun. Pemilu Langsung 2004 adalah demokrasi yang dikembalikan ke tangan rakyat, bukan dipercayakan kepada elit parlemen. Pembentukan KPK adalah perlawanan terhadap korupsi yang telah lama menjadi instrumen penindasan terhadap rakyat kecil oleh oligarki yang mengkooptasi negara. Mahkamah Konstitusi adalah pagar konstitusional yang melindungi hak-hak warga negara dari tekanan penguasa. Jika dibaca secara holistik, kebijakan-kebijakan era Ibu Mega adalah satu narasi yang koheren: membangun negara yang kuat, bersih, mandiri, dan berpihak kepada rakyat—seperti yang dimandatkan oleh ideologi PDI Perjuangan.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Presiden Republik Indonesia, 2001–2004

Warisan Institusional 2001–2004

- **Mahkamah Konstitusi** — pilar demokrasi konstitusional, pelindung hak warga dari abuse of power
- **KPK (UU No. 30/2002)** — arsitektur akuntabilitas independen yang menyentuh aktor kebal hukum
- **Pemilu Langsung 2004** — sumber legitimasi kepresidenan dipindahkan dari lantai MPR ke suara rakyat langsung
- **SJSN (UU No. 40/2004)** — kontrak sosial baru: jaminan kesehatan, hari tua, pensiun sebagai hak konstitusional; fondasi BPJS 2014
- **Tolak Coalition of the Willing (2003)** — bebas-aktif ditegakkan di bawah tekanan maksimum: invasi Irak tanpa mandat DK PBB ditolak
- **Reformasi TNI/Polri** — konsolidasi supremasi sipil atas pertahanan dan keamanan pasca-Reformasi 1998

“Semua kebijakan ini bukan kebijakan yang berdiri sendiri-sendiri. Dibaca secara holistik, ia adalah satu narasi: membangun negara yang kuat, bersih, mandiri, dan berpihak kepada rakyat—seperti yang dimandatkan oleh Marhaenisme dan Nasionalisme Kerakyatan PDI Perjuangan.”

Pelajaran dari kepemimpinan Presiden Megawati dalam konteks krisis pasca-1997 adalah bahwa memimpin keluar dari krisis tidak selalu berarti menyelesaikan krisis itu secara tuntas dalam satu periode kepresidenan. Kadang, yang lebih penting adalah memastikan bahwa institusi-institusi yang diperlukan untuk menyelesaikan krisis itu—dan untuk menghadapi krisis-krisis berikutnya—dibangun dengan cukup kokoh untuk bertahan. Indonesia yang memasuki dekade 2000-an dengan sistem hukum yang lebih kokoh, arsitektur pertahanan-keamanan yang lebih profesional, dan fondasi fiskal yang lebih bertanggung jawab, adalah sebagian warisan dari pilihan-pilihan konsolidatif yang dibuat di bawah tekanan terbesar. Ini adalah model kepemimpinan yang justru paling relevan untuk dibaca ulang ketika Indonesia kembali berdiri di tepi jurang—bukan mencari pemimpin yang menjanjikan solusi cepat, tetapi pemimpin yang sanggup membangun kapasitas institusional untuk melewati badai yang panjang.

Krisis 2008–2009 menawarkan pelajaran yang berbeda dan lebih menggembirakan. Indonesia, berbeda dari banyak negara, berhasil melewati krisis keuangan global dengan relatif mulus—pertumbuhan tetap positif, sistem perbankan tidak runtuh, dan Rupiah pulih dengan cepat. Kuncinya adalah kombinasi dari fundamentals yang lebih solid, koordinasi kebijakan yang lebih baik antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, serta permintaan domestik yang cukup kuat untuk mengimbangi penurunan ekspor.

Tetapi keberhasilan 2008–2009 menyembunyikan sebuah bahaya: ia menciptakan keyakinan yang berlebihan bahwa Indonesia telah ‘lulus ujian’ dan bahwa model pembangunan yang ada sudah cukup tahan banting. Investasi untuk memperkuat ketahanan struktural—diversifikasi ekspor, pengurangan ketergantungan impor pangan dan energi, pembangunan kapasitas kelembagaan—tidak dilakukan dengan urgensi yang sebanding dengan ukuran tantangan yang ada.

Krisis pandemi 2020–2021 memberikan pelajaran terbaru dan paling relevan. Indonesia merespons dengan stimulus fiskal yang signifikan—Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang besar, perlindungan sosial yang diperluas, dan moratorium kredit. Dalam jangka pendek, respons ini berhasil mencegah krisis yang lebih dalam. Tetapi ia juga meninggalkan warisan: ruang fiskal yang lebih sempit, utang yang lebih tinggi, dan ekspektasi publik yang meningkat terhadap peran negara dalam perlindungan sosial—ekspektasi yang sulit dipenuhi jika krisis berikutnya datang dengan ruang manuver yang lebih terbatas.

Membaca ketiga krisis ini secara komparatif menghasilkan satu pelajaran yang konsisten: Indonesia berhasil keluar dari krisis ketika dan hanya ketika tiga kondisi terpenuhi bersamaan. Pertama, ada kepemimpinan yang mampu membuat keputusan sulit di bawah tekanan dan mengkomunikasikannya dengan legitimasi yang cukup. Kedua, ada koordinasi yang efektif antara otoritas fiskal, moneter, dan sektoral. Ketiga, ada narasi publik yang koheren yang memungkinkan masyarakat menerima pengorbanan jangka pendek demi stabilitas jangka panjang. Absennya satu saja dari ketiga kondisi ini dalam krisis yang datang akan membuat proses pemulihan jauh lebih panjang dan lebih menyakitkan.

IV. KANAL SOLUSI YANG SEMPIT

Satu pertanyaan yang sering dihindari dalam diskusi kebijakan Indonesia—karena jawabannya tidak nyaman—adalah: jika krisis datang dengan intensitas yang sebanding dengan 1997–1998, apakah Indonesia masih memiliki instrumen yang cukup untuk meresponsnya? Jawaban yang jujur adalah: lebih sedikit dari yang diperkirakan, dan semakin menyempit.

Kanal fiskal—kemampuan pemerintah untuk merespons krisis melalui stimulus belanja—adalah yang paling jelas menyempit. Batas defisit tiga persen GDP yang diamanatkan undang-undang, dikombinasikan dengan beban bunga utang yang sudah tinggi dan ruang untuk pajak tambahan yang terbatas, meninggalkan pemerintah dengan sedikit fleksibilitas fiskal yang sesungguhnya. Berbeda dari 2020, ketika defisit sementara diizinkan melampaui batas itu, krisis kepercayaan pasar dalam kondisi tekanan eksternal yang tinggi dapat membuat pelanggaran batas fiskal sekalipun menjadi bumerang.

Kanal moneter menghadapi dilema yang lebih akut. Bank Indonesia memiliki instrumen konvensional—suku bunga, operasi pasar terbuka, intervensi nilai tukar—tetapi ruang manuvernya sangat dibatasi oleh kondisi eksternal. Siklus pengetatan moneter global yang dipimpin Federal Reserve AS telah mempersempit kemampuan Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga tanpa memicu larinya modal. Cadangan devisa, meski masih di atas ambang kritis, tidak cukup besar untuk mempertahankan nilai tukar secara berkelanjutan jika tekanan pasar terus-menerus.

Kanal perdagangan—kemampuan untuk memperluas ekspor sebagai katup pelepas tekanan—juga menghadapi kendala struktural. Ekspor Indonesia masih sangat bergantung pada komoditas mentah yang harganya ditentukan sepenuhnya oleh kondisi

pasar global. Diversifikasi ke manufaktur bernilai tambah tinggi, yang sudah menjadi agenda kebijakan selama dua dekade, belum menghasilkan perubahan struktural yang cukup signifikan untuk menjadi sandaran dalam kondisi krisis.

Kanal investasi—kemampuan untuk menarik modal asing sebagai sumber pertumbuhan alternatif—menghadapi persaingan yang semakin ketat. ‘Reshoring’ dan ‘friendshoring’ yang didorong oleh kebijakan industri AS dan Eropa, serta daya tarik Vietnam dan India yang semakin meningkat sebagai tujuan investasi manufaktur, berarti bahwa Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan arus investasi asing sebagai solusi dasar untuk setiap masalah pertumbuhan.

“Setiap kanal solusi yang tersedia—fiskal, moneter, perdagangan, investasi—menghadapi kendala yang lebih berat dari sebelumnya. Ruang manuver Indonesia nyata-nyata menyempit.”

Yang tersisa, dan ironisnya merupakan kanal yang paling sering diabaikan dalam diskusi kebijakan konvensional, adalah kanal sosial-politik: kemampuan untuk membangun konsensus nasional yang cukup kuat untuk menopang kebijakan-kebijakan sulit yang diperlukan. Konsolidasi lintas sektor—antara pemerintah, sektor swasta, serikat pekerja, akademisi, media, dan masyarakat sipil—dalam merumuskan dan mengkomunikasikan narasi yang koheren tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, adalah aset yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Ada juga kanal regional yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. ASEAN sebagai arsitektur kawasan memiliki potensi untuk menjadi penyangga kolektif terhadap guncangan global—melalui koordinasi kebijakan makroekonomi, fasilitas ‘swap’ mata uang, dan rantai pasok regional yang lebih terintegrasi. Tetapi potensi ini bergantung pada komitmen politik yang konsisten dari semua anggota, sesuatu yang selama ini lebih sering diucapkan daripada diwujudkan.

Dan ada kanal yang paling mendasar dari semuanya: kapasitas adaptasi masyarakat Indonesia sendiri. Sejarah menunjukkan bahwa ketika negara gagal, masyarakat Indonesia sering menemukan cara-cara informal untuk bertahan dan beradaptasi—melalui jaringan sosial, ekonomi lokal, dan solidaritas komunitas. Ini adalah kapasitas nyata yang tidak boleh diremehkan.

PENUTUP: SATU LANGKAH DARI TEPI

Berdiri di tepi jurang bukanlah hukuman mati. Ia adalah peringatan. Bangsa-bangsa yang telah berdiri di posisi yang sama—Korea Selatan pada 1997, Brazil pada 2002, Turki pada berbagai momen dalam dua dekade terakhir—menunjukkan bahwa ini bukan titik akhir. Apa yang membedakan mereka yang selamat dari tepi dari mereka yang jatuh ke dalamnya adalah hampir selalu bukan keberuntungan, tetapi kualitas kepemimpinan dan kecepatan pengakuan atas realitas.

Indonesia memasuki 2026 dengan beban warisan yang berat: ruang fiskal yang menyempit, ketidakpastian moneter, kerentanan rantai pasok, dan keresahan sosial yang terakumulasi. Tetapi ia juga memasuki 2026 dengan aset yang nyata: demografi muda yang produktif, pasar domestik yang besar, posisi geopolitik yang strategis, dan—yang paling berharga—pengalaman melewati krisis yang sudah teruji.

Pertanyaan yang menentukan bukan apakah Indonesia mampu melewati momen ini. Sejarah menunjukkan ia mampu. Pertanyaannya adalah dengan harga berapa, dan

apakah biaya itu—dalam bentuk penderitaan masyarakat, kemunduran pembangunan, dan erosi kepercayaan institusi—akan ditanggung secara tidak proporsional oleh mereka yang paling tidak berdaya.

Menjawab pertanyaan itu dengan jujur, dan bertindak berdasarkan jawabannya sebelum jendela kesempatan tertutup, adalah tugas yang tidak dapat lagi ditunda. Tepi jurang geopolitik tidak menunggu—dan celah antara kesadaran dan tindakan adalah ruang di mana krisis lahir.

Jalan Mabes Hankam No. T65, Bambu Apus, Cilangkap, DKI Jakarta 13890

Email: lab45@lab45.id | Telp: +62811452045

*Silahkan hubungi tim editorial untuk pertanyaan melalui
lab45@lab45.id*